

Peran PPKn sebagai pendidikan Multikultur dalam Meningkatkan Toleransi Siswa

Ogi Haryono ^{1✉}, Yudi Firmansyah ², Tridays Repelita ³

(1,2,3) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Buana Perjuangan Karawang

✉ Corresponding author

(pk20.ogiharyono@mhs.ubpkarawang.ac.id)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami peran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam mengembangkan toleransi siswa di sekolah menengah atas. Penelitian ini berfokus pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Klari. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan metode deskriptif. Guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dan siswa kelas X berpartisipasi dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPKn memiliki peran besar dalam meningkatkan pemahaman dan sikap siswa tentang toleransi. Siswa mengembangkan kesadaran yang mendalam tentang pentingnya toleransi ketika menghadapi keragaman masyarakat dengan mempelajari cita-cita Pancasila seperti Bhinneka Tunggal Ika, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Persatuan Indonesia. Pendidikan multikultural melalui mata pelajaran PPKn merupakan teknik yang berhasil untuk menumbuhkan generasi yang toleran dan menghargai perbedaan masyarakat.

Kata Kunci: PPKn, Pendidikan Multikultur, Toleransi.

Abstract

The purpose of this research is to better understand the role of Pancasila and Citizenship Education in developing students' tolerance in high school. This research focuses on class X students of SMA Negeri 2 Klari. The method used is a qualitative approach combined with descriptive methods. Pancasila and citizenship education (PPKn) teachers and grade X students participated in this study. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted in three stages: data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that PPKn has a big role in improving students' understanding and attitudes about tolerance. Students develop a deep awareness of the importance of tolerance when facing the diversity of society by learning the ideals of Pancasila such as Unity in Diversity, Belief in One God, and Indonesian Unity. Multicultural education through Civics subjects is a successful technique to foster a generation that is tolerant and appreciative of societal differences.

Keyword: Civics, Multicultural Education, Tolerance

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang luas dengan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang luar biasa, tidak dapat disangkal bahwa banyaknya budaya ini telah mendorong gagasan bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dari segi etnis, ras, dan agama. Keberagaman budaya Indonesia adalah fakta sosial dan historis yang tidak dapat dibantah. Keunikan budaya yang beragam membuat pandangan, perilaku, dan pembawaan pribadi masing-masing menjadi tradisi dalam masyarakat dan daerah. Menurut Will Kymlicka (1995) Masyarakat multikultural yang adil diharapkan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok minoritas agar dapat melestarikan kekayaan budaya mereka dan mencapai kesetaraan politik dan sosial. Pendekatan multikultur mengusung gagasan bahwa setiap kelompok memiliki hak untuk mempertahankan dan merayakan identitas budayanya sendiri, sambil tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak individu, penekanan pada toleransi, serta menghindari diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, yang menggantikan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi, wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Menurut H.A.R. Tilaar (2018) Menegaskan bahwa pendidikan pancasila dan

kewarganegaraan (PPKn) adalah bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia, dengan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan sikap peserta didik. Menurut Sapriya, (dalam penelitian yang dilakukan oleh Ina Magdalena pada tahun 2020), Mengemukakan bahwa tujuan utama dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk memfasilitasi keterlibatan individu dalam urusan politik negaranya secara rasional dan bertanggung jawab, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dianggap sebagai bagian integral dari proses pendidikan, baik dalam lingkungan formal maupun informal, Hal ini dibuktikan dengan penekannya dalam kurikulum sekolah, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diperkenalkan di semua jenjang pendidikan, termasuk di tingkat sekolah dasar. Dengan memberikan pembelajaran mengenai sikap, keterampilan, dan praktek perilaku sejak usia dini, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi alat untuk membangun masyarakat yang demokratis, dan menunjukkan betapa pentingnya penanaman nilai-nilai demokrasi sejak dini guna menciptakan fondasi yang kuat bagi perkembangan masyarakat yang inklusif dan bertanggung jawab secara politik.

Pendidikan multikultural merupakan strategi pembelajaran yang menekankan perlunya menghargai dan menghormati keragaman, termasuk perbedaan ras, budaya, dan aspek-aspek lain yang bervariasi. James A. Banks (2006) berpendapat bahwa pendidikan multikultural seharusnya tidak hanya mempromosikan toleransi, tetapi juga mengupayakan transformasi sosial. Perubahan ini memiliki tiga aspek utama: Individu mengalami transformasi pribadi, institusi pendidikan mengadopsi perspektif dan metodologi baru, dan perubahan ini secara kolektif berdampak pada masyarakat. James Banks, sebagaimana dikutip oleh Muh. Amin pada tahun (2018), Memberikan definisi pendidikan multikultural yang secara khusus berkaitan dengan mereka yang termasuk dalam kelompok ras dan etnis minoritas. Hal ini menyiratkan bahwa pendidikan multikultural berusaha untuk menyelidiki keragaman sebagai aspek yang penting dan berharga. Melendez & Beck (2013: 203-304) menguraikan lima elemen kunci multikulturalisme: Menumbuhkan berbagai sudut pandang, Meningkatkan sensitivitas budaya, Meningkatkan kemahiran dalam komunikasi antar budaya, Memerangi rasisme, seksisme, prasangka, dan kesenjangan, Mendorong pengembangan kemampuan untuk aktivisme sosial.

Toleransi berasal dari kata Latin "Tolerare," yang mengandung konsep toleransi, batasan, dan mengizinkan suatu peristiwa terjadi. Umar Hasyim, sebagaimana dikutip oleh Sofian Abdulatif (2021), mendefinisikan toleransi sebagai tindakan memberikan kebebasan kepada individu untuk menjalankan keyakinannya sendiri dan mematuhi hukumnya sendiri, selama tidak melanggar atau bertentangan dengan syarat-syarat ketertiban dan keselarasan masyarakat. Marzuki (2019) mendefinisikan toleransi sebagai tindakan yang menunjukkan sikap saling menghormati dan mengizinkan penerimaan perspektif, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, tindakan, dan aspek-aspek lain yang berbeda atau berlawanan dengan posisi seseorang. Tillman (2004) Mendefinisikan toleransi mencakup beberapa karakteristik, antara lain kesediaan untuk menoleransi perbedaan, keterbukaan pikiran, menghormati orang lain, dan kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai. Melalui pemahaman dan penerimaan terhadap ide-ide baru. Toleransi komponen penting dalam membentuk karakter warga negara, toleransi dapat membantu kita menghindari diskriminasi. Toleransi sangat penting, karena masyarakat Indonesia sangat beragam, dengan budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda. Prinsip toleransi bukan hanya harus diterapkan, tetapi juga merupakan landasan yang harus dijunjung tinggi untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, bebas dari konflik yang berkepanjangan, dan untuk mencegah korban yang disebabkan oleh sikap intoleran. Sikap toleransi dapat membawa dampak positif berupa saling menghormati dan bekerja sama di antara semua orang. Cara terbaik untuk mempromosikan sikap toleransi adalah melalui pendidikan kewarganegaraan, karena mata pelajaran tersebut erat kaitannya dengan nilai-nilai moral Pancasila.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nurul Aini et al., 2022) yang berjudul "Pengaruh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap Peningkatan Sikap Toleransi Siswa di Sekolah Menengah Pertama" Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berdampak positif pada peningkatan sikap toleransi siswa di sekolah menengah pertama. Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pipit Widiatmaka et al., 2023) yang berjudul "peran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural dalam menanggulangi radikalisme" mengatakan bahwa pendidikan multikultural dan pendidikan kewarganegaraan dapat membantu memerangi radikalisme. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kemampuan untuk mengajarkan siswa nilai-nilai seperti menghormati perbedaan, saling menghargai, dan toleransi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang serupa, penelitian ini berupaya mengkaji peran PPKn sebagai pendidikan multikultur dalam meningkatkan toleransi siswa di SMA Negeri 2 Klari. Fenomena-fenomena anti-toleransi yang muncul di lingkungan sekolah menengah atas merupakan suatu permasalahan serius yang dapat menimbulkan perpecahan di antara peserta didik. Hal ini menjadi lebih rumit karena setiap peserta didik membawa latar belakang yang berbeda-beda. Jika paham-paham intoleransi terus berkembang di dalam lingkungan sekolah, dampaknya bisa menciptakan ketegangan dan perpecahan di antara peserta didik.

Bahkan, ketika paham-paham tersebut merambah ke dalam masyarakat lebih luas, dapat mengakibatkan disintegrasi nasional di Indonesia.

Respons yang cepat dan tepat diperlukan untuk mengatasi kejadian ini, untuk mengurangi dan mungkin menghapus prevalensi ideologi anti-Pancasila di seluruh populasi, terutama di lembaga pendidikan. Para pelajar saat ini sedang menghadapi pergulatan mendasar dengan karakter mereka, terutama dalam hal kemampuan mereka untuk bertoleransi dengan orang lain. Elemen teknologi dan ketersediaan informasi yang meluas melalui internet semakin memperparah masalah ini, karena berpotensi memicu tindakan intoleransi. Sangat penting untuk menyoroti pentingnya pengajaran yang interaktif dan efisien di semua mata pelajaran, terutama pengajaran Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Memfasilitasi perolehan pengetahuan yang komprehensif dalam PPKn yang meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran merupakan tugas yang kompleks. Dalam lingkup Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, siswa ditanamkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perilaku yang sesuai dengan Pancasila dan kualitas moral yang patut diteladani. Tujuan utama dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah menciptakan generasi yang terampil dalam berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda, mempromosikan dialog, toleransi, dan kerjasama dalam menghadapi kompleksitas masyarakat modern. Toleransi adalah pola pikir yang melibatkan penghormatan terhadap otonomi orang lain dan mengakui keragaman sebagai aspek integral dari hak asasi manusia. Prinsip toleransi harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya terbatas pada ranah pembelajaran. Selain itu, memasukkan pendidikan Kewarganegaraan yang terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah merupakan langkah penting untuk menjamin keberhasilannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif. Sugiyono (2018) Mendefinisikan teknik penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan metodologis yang disusun dengan dasar filosofis postpositivisme. Pendekatan ini digunakan untuk menginvestigasi fenomena pada konteks alamiah, dengan menggunakan metode eksperimental, di mana peran peneliti menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penelitian kualitatif merupakan suatu cara eksplorasi yang digunakan untuk meraih pemahaman menyeluruh terhadap suatu peristiwa dengan menghimpun serta menelaah data yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 2 KLARI yang terletak di Jalan Kosambi, Dusun Klari Karanganyar, RT/RW. 033/010, Desa. Duren, Kec. Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat, 41371. Partisipan penelitian terdiri dari sejumlah guru yang mengajar mata pelajaran PPKn serta siswa yang berada di tingkat kelas X. Informasi dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data melibatkan tiga tahap yang berbeda: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi langsung yang di laksanakan di SMA Negeri 2 Klari dengan informan Anita Debie Agustina, S.Pd selaku guru PPKn dan Calista Putri, Iva Nusamana, Trimita Kirani, Najunir Inaya, Rahma Alfiani, Renjani Putri, Salsa Siva, Saskia Awina, Sifa Aulia Nurdianti, Sopi Puspitawardhani selaku siswa dari kelas X. Menurut AD selaku guru PPKn di SMA Negeri 2 Klari, Mengemukakan sikap toleransi memegang peran yang sangat penting dalam konstruksi dan pemeliharaan kehidupan masyarakat yang harmonis. Kontribusinya yang beragam mampu terlihat dari berbagai sudut, termasuk dalam memperkuat solidaritas dan kerjasama di tengah masyarakat. Toleransi mendorong individu untuk saling menghargai dan saling membantu, menciptakan rasa kesatuan yang kuat dan solidaritas diantara warganya. Tradisi seperti gotong royong dan siskamling menjadi gambaran nyata semangat kerjasama dan kepedulian antarwarga yang dihasilkan dari sikap toleransi ini. Lebih lanjut, toleransi juga memiliki peran besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara umum. Dengan menciptakan ruang yang aman dan inklusif, toleransi memungkinkan semua orang terlibat dalam kegiatan dan pengambilan keputusan di lingkungan sosial. Sebagai contoh, tugas mewawancarai ketua RT dan penduduk sekitar tidak hanya mendorong siswa untuk memahami, tetapi juga untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial di sekitarnya. Tidak hanya itu, sikap toleransi juga membantu mencegah konflik dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Toleransi berfungsi sebagai pengaman terhadap kemungkinan konflik dan perpecahan dalam masyarakat dengan mempromosikan resolusi damai dan konstruktif atas perbedaan dan ketidaksepakatan. Selain itu, merangkul dan menerima keragaman etnis, agama, dan budaya menjadi dasar yang kuat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan mempromosikan persatuan nasional. Toleransi tidak hanya membawa keuntungan dari segi sosial dan budaya, tetapi juga berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Toleransi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dengan menumbuhkan suasana yang mendorong pertumbuhan dan kemakmuran bersama. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) memiliki fungsi yang signifikan dalam menumbuhkan toleransi di kalangan generasi muda. Siswa dimotivasi untuk memahami dan

menghargai keberagaman, dan secara aktif berkontribusi dalam membangun komunitas yang mempromosikan toleransi melalui pendidikan dan kegiatan yang beragam. Oleh karena itu, toleransi tidak hanya merupakan prinsip dasar, tetapi juga merupakan gagasan yang harus terus berkembang dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi tidak hanya membantu individu, tetapi juga menjadi landasan bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa.

Lebih lanjut, AD menjelaskan bahwa kewajiban siswa terhadap keberagaman tidak hanya ditunjukkan melalui prestasi akademis mereka, tetapi juga melalui sikap dan tindakan sehari-hari. Faktor penting dalam mengevaluasi tingkat tanggung jawab siswa terhadap keberagaman adalah sikap mereka terhadap teman sebaya yang berbeda agama. Siswa yang memiliki kesadaran akan keberagaman akan menunjukkan sikap toleransi dan rasa hormat yang kuat terhadap teman sebayanya yang memiliki pendapat yang berbeda. Mereka tidak hanya menahan diri untuk tidak melakukan perundungan atau tindakan diskriminatif, tetapi juga secara aktif berusaha untuk memahami dan menghargai berbagai pendapat yang ada. Dengan secara aktif terlibat dalam inisiatif untuk menjaga keharmonisan dan saling menghormati, siswa yang bertanggung jawab atas keberagaman menyediakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung untuk semua orang.

Menurut KP sebagai seorang siswa di kelas X-3, Menjelaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berfokus pada pengajaran kepada siswa tentang perbedaan agama dan budaya, dengan tujuan untuk memupuk toleransi. Slogan "Bhinneka Tunggal Ika" menunjukkan dedikasi yang kuat untuk merangkul keragaman, yang berfungsi sebagai prinsip dasar negara Indonesia. Pada dasarnya, istilah ini menggarisbawahi bahwa meskipun Indonesia memiliki keragaman etnis, agama, ras, dan budaya yang melimpah, konsep keutuhan dan kebersamaan tidak dapat dipisahkan. Frasa ini berfungsi sebagai prinsip panduan bagi semua orang Indonesia, mendorong mereka untuk hidup berdampingan bersama, menunjukkan rasa saling menghormati, dan menjunjung tinggi persatuan meskipun ada perbedaan. Kewajiban untuk mempromosikan keberagaman tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga meluas ke semua sektor masyarakat, termasuk siswa. Siswa, sebagai bagian dari generasi muda, memiliki peran penting dalam melestarikan dan merawat keberagaman bangsa. Mereka diharapkan tidak hanya memiliki keahlian, tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam menciptakan tempat kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman. Esensi dari Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai kekuatan pendorong bagi siswa untuk secara aktif melestarikan keberagaman sebagai aspek fundamental dari identitas dan kebangsaan Indonesia.

Menurut RA dan SA, Menyatakan bahwa PPKn memainkan peran penting dalam mempromosikan toleransi di sekolah. Pentingnya mengajarkan siswa tentang keberagaman tidak dapat diabaikan, karena hal ini sangat berkontribusi pada pemahaman dan apresiasi mereka terhadap perbedaan. Dengan mendalami mata pelajaran ini, siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang konsep-konsepnya, tetapi juga menyerap pentingnya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, anak-anak memiliki potensi untuk berkembang menjadi individu yang memiliki toleransi, memiliki perspektif yang luas, dan siap untuk memberikan kontribusi yang berharga dalam membangun bangsa yang harmonis dan sejahtera. Tujuan utama dari proses pendidikan ini adalah untuk menumbuhkan sikap dan sudut pandang yang baik di antara para siswa dengan membina lingkungan belajar yang inklusif dan berorientasi pada keragaman. Hal ini mencakup pengembangan pemahaman dan apresiasi terhadap berbagai perbedaan yang ada di masyarakat.

Perspektif lain dari siswa kelas X, yang diwakili oleh NI dan SP, menegaskan bahwa PPKn memainkan peran penting dalam memupuk toleransi siswa. Hal ini dikarenakan adanya penekanan yang signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberagaman ke dalam setiap pelajaran dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang inklusif, yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sangat memengaruhi pemahaman dan apresiasi siswa terhadap berbagai realitas yang ada di sekitar mereka. Pendidikan memainkan peran penting dalam mengembangkan generasi masa depan yang tidak hanya menerima keragaman, tetapi juga berpikiran terbuka. Pendidikan yang mengintegrasikan cita-cita yang beragam akan membentuk dasar bagi para siswa untuk menjadi katalisator transformasi yang siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa yang harmonis dan sukses. Dengan mengadopsi metode ini, sekolah-sekolah memupuk suasana yang tidak hanya mendorong perkembangan akademis, tetapi juga menumbuhkan kepribadian yang inklusif dengan kesadaran yang tinggi akan keragaman masyarakat. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, terutama dalam menghadapi kompleksitas globalisasi dan transformasi yang cepat. PPKn adalah disiplin ilmu penting yang lebih dari sekadar gagasan. PPKn berfungsi sebagai panduan etis, membimbing kaum muda menuju pengembangan keahlian yang esensial untuk menjadi warga negara yang berkompeten dan bertanggung jawab.

Winataputra (dalam Winarno: 2019) Mendefinisikan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai sebuah program pendidikan yang disusun secara khusus untuk mempersiapkan peserta didik dengan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan agar mereka mampu secara efektif mengaplikasikan hak-hak yang mereka miliki dan menjalankan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam kerangka sistem demokrasi. Westheimer & Kahne (2023) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan

elemen penting dalam kurikulum pendidikan. Tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan memenuhi tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat yang terlibat. Penting bagi siswa untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota suatu bangsa dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dalam upaya sosial dan politik dengan tujuan untuk melakukan perubahan transformatif.

Keberagaman di Indonesia tidak muncul secara spontan, melainkan muncul melalui proses yang bertahap, yang menghasilkan pembentukan kesatuan yang terdiri dari individu-individu dengan asal-usul yang berbeda, yang secara kolektif diakui sebagai bangsa Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Naim & Sauqi (dalam Anissa Wika Alzana & Yuni Harmawati: 2021) Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mementingkan kehadiran budaya lain, dengan tujuan mempromosikan pola pikir penerimaan yang menumbuhkan lingkungan yang harmonis dan mencegah terjadinya konflik. Charles Taylor (1992) mendefinisikan multikulturalisme sebagai strategi politik yang berusaha untuk mengakui dan menghargai identitas budaya kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam sebuah komunitas. Pendekatan ini menyoroti pentingnya mengakui keragaman budaya sebagai sumber daya penting dalam kemajuan sosial dan politik. Mengakui identitas budaya kelompok minoritas dipandang sebagai langkah penting dalam mempromosikan inklusi sosial dan menjunjung tinggi hak-hak individu dalam masyarakat yang beragam. Banks (2019) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendekatan instruksional yang membekali siswa dengan sikap, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk secara efektif terlibat dan berpartisipasi dalam masyarakat yang heterogen. Savage & Armstrong (dalam Sipuan et al: 2022) berpendapat bahwa pendidikan multikultural memainkan peran penting dalam memperluas perspektif siswa dengan memaparkan mereka pada berbagai sudut pandang dari budaya yang berbeda. Hal ini memfasilitasi pemahaman siswa terhadap keragaman budaya dan menumbuhkan rasa bangga terhadap latar belakang budaya mereka sendiri. Selain itu, pendidikan multikultural memfasilitasi individu dalam memahami bahwa sudut pandang yang berbeda sering kali menimbulkan konflik dalam kelompok-kelompok masyarakat.

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah jenis pendidikan multikultural yang membantu membentuk generasi muda yang peduli dengan lingkungan sekitar dan mampu terlibat aktif dalam menyelesaikan konflik sosial. Tujuannya adalah untuk menghasilkan orang-orang yang bijaksana, tidak mudah terpicu oleh konfrontasi, dan memiliki sikap intelektual. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memupuk kebersamaan sambil menghargai keragaman, tanpa menunjukkan superioritas atau merendahkan orang lain. Teknik ini juga berusaha memberikan pengaruh positif bagi bangsa dan negara sambil menanamkan rasa ingin maju dan mandiri. Mematuhi prinsip-prinsip Pancasila dimaksudkan untuk menghasilkan pemimpin yang berwawasan luas dan penerus yang kompeten yang mampu menyelesaikan perselisihan berbasis perbedaan.

Indonesia, sebagai sebuah negara, mengikuti Pancasila sebagai ideologi fundamentalnya untuk mengembangkan filosofi kehidupan yang lengkap yang secara efisien memenuhi tuntutan yang berbeda dari warganya. Pancasila memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ideologi ini berperan sebagai konsep panduan dan fondasi untuk mencegah perselisihan terkait kemajemukan di antara warga negara dengan menekankan nilai-nilai multikultural. Keragaman geografis Indonesia, yang meliputi beberapa pulau, menciptakan lingkungan yang subur bagi beragam peradaban, ras/etnis, bahasa, suku, dan agama. Pancasila dapat disimpulkan sebagai dasar yang tepat untuk pendidikan multikultural karena Pancasila menggabungkan dan mempromosikan ide-ide keberagaman Indonesia.

Slamet (Anissa Wika Alzana & Yuni Harmawati: 2021) Menjelaskan cita-cita Pancasila yang dimasukkan dalam pendidikan multikultural sebagai berikut: Nilai pertama adalah nilai spiritual yang penting bagi semua orang di masyarakat. Membangun hubungan yang bersahabat antara orang-orang dari berbagai agama, serta memastikan kebebasan mereka untuk menjalankan keyakinan mereka sendiri, sangatlah penting. Perintah pertama mengajarkan rasa hormat kepada Tuhan, kepatuhan terhadap petunjuk-Nya, dan menghindari larangan-Nya. Individu yang mematuhi prinsip-prinsip agama mereka menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan menerima di antara para penganut agama lain. Individu-individu hidup bersama dengan bahagia, menunjukkan kerja sama antar agama untuk mempromosikan toleransi dan menghindari kegiatan ekstrem yang dapat menimbulkan ketakutan dan menciptakan perpecahan di antara mereka. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mencakup nilai-nilai yang mendorong hubungan antarpribadi, seperti kesetaraan, hak asasi manusia, persatuan, keadilan, dan perilaku etis. Keyakinan Pancasila mendorong kesetaraan dan rasa hormat terhadap semua individu. Setiap orang didorong untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia, mempromosikan persatuan, dan menanamkan rasa keadilan dan kesusilaan di semua bagian masyarakat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan konsep-konsep kekompakan seperti patriotisme, kesetiaan nasional, penghargaan terhadap keragaman, dan semangat kerja sama komunal yang dikenal dengan gotong royong. Ide-ide ini menginspirasi warga untuk merangkul dan menghargai keragaman dan kemajemukan Indonesia. Penghormatan terhadap keragaman agama, etnis, ras, dan bahasa mendorong persatuan. Setiap individu diharapkan dapat melindungi kepentingan bersama dan bekerja sama

dalam semangat gotong royong untuk mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menyoroti perlunya menggunakan hikmat kebijaksanaan dan diskusi untuk mencapai mufakat. Setiap orang didorong untuk membantu membangun budaya demokrasi yang mendorong perdebatan kritis dalam semua proses pengambilan keputusan, termasuk di tingkat pemerintah dan masyarakat. Relevansi diskusi disoroti oleh nilai yang melekat pada setiap suara dalam masyarakat demokratis. Sila keempat Pancasila mendorong masyarakat Indonesia untuk mengembangkan budaya demokratis. Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mencakup konsep keadilan sosial yang konsisten dengan tujuan bersama. Seluruh rakyat Indonesia menuntut keadilan sosial, kesejahteraan bersama, pemerataan pendidikan dan infrastruktur, serta jaminan sosial. Dengan tidak adanya ketidaksetaraan, setiap orang didorong untuk berpartisipasi aktif dalam upaya mencapai kesejahteraan dan kesetaraan sosial, bekerja sama tanpa memandang status sosial ekonomi atau latar belakang budaya.

Peran guru memiliki dampak yang cukup besar dalam membentuk keyakinan moral siswa, dengan tujuan untuk menumbuhkan penerimaan secara sukarela dan pemeliharaan status multikultural Indonesia. Dalam hal ini, konsepnya adalah bahwa semua guru harus jujur dan berkomitmen pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pengabdian masyarakat Indonesia pada norma-norma moral yang kuat mengembangkan budaya toleransi, saling menghormati, dan menghargai, sehingga membatasi frekuensi pertentangan yang dimotivasi oleh kekhawatiran akan keruntuhan sosial. Dinamika perkembangan keilmuan dalam Pancasila, serta pendidikan kewarganegaraan, harus diubah untuk merefleksikan tren dan tuntutan saat ini. Namun, hal ini tidak mengubah kebutuhan inti dan substansi dari tujuan keilmuannya, yaitu untuk membina siswa yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dalam rangka mengembangkan nilai dan moral, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus memberikan kesadaran penuh dan pengetahuan yang meyakinkan tentang perlunya menerima dan memelihara keragaman bangsa.

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelestarian persatuan nasional Indonesia dengan menanamkan prinsip-prinsip ketuhanan dan kemanusiaan. Selain itu, pendidikan ini mengangkat bangsa ini ke puncak peradabannya. Merangkul dan memupuk keragaman bangsa, serta secara aktif mendukung perdamaian dan kebersamaan nasional, mencontohkan prinsip-prinsip warga negara yang bermoral dan dapat ditafsirkan sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan yang lebih tinggi. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berupaya mendidik warga negara dengan cara yang disengaja dan metodis, oleh karena itu memperkuat identitas nasional dan cita-cita moral. Ini berfungsi sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban membela negara, menjamin kesejahteraan dan kemajuan, dan mendorong sikap positif di antara penduduk, seperti toleransi. Pendidikan Kewarganegaraan, juga dikenal sebagai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, merupakan strategi yang efektif untuk mempromosikan multikulturalisme dan meningkatkan toleransi di antara individu. Jenis pengajaran ini mendorong pemikiran kritis dan mengembangkan orang-orang yang sadar akan kata-kata, ide, dan tindakan mereka. Individualitas juga penting dalam kemampuan suatu bangsa untuk berhasil dalam bidang ini. Hilangnya ciri khas ini akan menyebabkan kemunduran generasi penerus bangsa. Kepribadian memiliki dampak yang luar biasa dalam mencegah bangsa dipengaruhi oleh pendidikan, dan pengembangan kepribadian bangsa secara langsung terkait dengan pengembangan berbagai aspek, seperti halnya dengan pertumbuhan berbagai industri. Diperkirakan bahwa menambahkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ke dalam pendidikan multikultural di sekolah-sekolah akan membantu meringankan masalah-masalah sosial di masyarakat. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sangat penting karena menekankan pengembangan nilai-nilai moral dan konstruktif melalui ajaran-ajarannya, yang berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk pertumbuhan pribadi dan nasional. Pendidikan ini mempromosikan mentalitas yang toleran, mendorong orang untuk terus menunjukkan perilaku yang sangat baik dan menerima keragaman yang ada pada orang lain. Toleransi memungkinkan siswa untuk tetap tenang dan berpikiran terbuka ketika dihadapkan dengan pendapat atau kritik yang berbeda, membantu mereka untuk menerima dan memahami sudut pandang alternatif. Hal ini mendorong rasa saling menghormati dan memahami di antara para siswa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMAN 2 Klari menunjukkan bahwa peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultur dapat mengembangkan toleransi siswa. PPKn tidak hanya menjadi tempat pembelajaran nilai-nilai fundamental seperti Bhinneka Tunggal Ika, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Persatuan Indonesia, tetapi juga mengintegrasikan materi tentang keragaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia. Siswa kelas X dan informan lainnya menyoroti peran PPKn dalam meningkatkan toleransi siswa, mengakui bahwa materi PPKn membantu mereka memahami dan menghargai perbedaan, serta menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung pertumbuhan karakter positif. Bhinneka Tunggal Ika dianggap sebagai panduan untuk menjalani kehidupan secara harmonis, saling menghormati, dan

menjaga persatuan di tengah keragaman. Dengan demikian, PPKn tidak hanya menyediakan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap toleransi yang menjadi dasar bagi siswa. Kontribusi positif PPKn dalam membentuk siswa yang inklusif dan toleran menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua peneliti yaitu ayahanda Rusda Suyanto dan Ibunda Yati, selalu memberikan dukungan melalui doa, nasehat, perhatian, dan kasih sayang yang luar biasa, memberikan semangat yang tak terukur dalam penyelesaian artikel ini. Peneliti juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Bapak Yudi Firmansyah dan Bapak Tridays Repelita sebagai dosen pembimbing yang telah dengan sukarela meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sepanjang penelitian ini. Selanjutnya, peneliti juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah dan seluruh guru di SMA Negeri 2 Klari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Rosyadi, M. (2022). Pengaruh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap Peningkatan Sikap Toleransi Siswa di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Islam STAIN Kudus*, 7(1), 1-14. <https://journal.actual-insight.com/index.php/educare/article/view/1697>
- Amin, M. (2018). Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 10(2), 315-330. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/5020>
- Alzanaa, A. W. Y. H. (2021). Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural. *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1-17. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship/index>
- Banks, J. A. (2006). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching*. Boston: Allyn & Bacon.
- Banks, J. A. (2019). *An introduction to multicultural education (5th ed.)*. New York: Routledge.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship*. Oxford University.
- Magdalena, I. (2020). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar negeri bojong 3 pinang. *Jurnal Pendidikan dan Sains*, 2(3), 418-430. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang/article/view/995>
- Melendez, S. J., & Beck, E. T. (2013). *Multicultural competence in the context of counseling and psychotherapy*. Routledge.
- Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Sipuan, I. W. (2022). Pendekatan Pendidikan Multikultural. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(1), 1-17. <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/>
- Sofian Abdulatif, D. A. (2021). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)*, 4(2), 227-238. <https://journals.ums.ac.id/index.php/ppd/>
- Sugiyono, P. D. (2018). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. bandung: alfabeta.
- Taylor, Charles. (1992). *Multiculturalism and the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press.
- Tilaar, H. A. (2018). *Pendidikan multikultural dalam perspektif global*. Jakarta: Grasindo.
- Tillman, D. (2004). *Pendidikan nilai untuk kaum muda dewasa*. Jakarta: Grasindo
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2023). *Civic education for a divided America: A research agenda*. New York: The Century Foundation.
- Winarno, S. (2019). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daiman, Y. M. D. I. (2019). Penanaman Toleransi Pada Mahasiswa PPKn Dari Berbagai Budaya. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen*. <https://proceedings.ums.ac.id/>